

## PERAN KOMUNIKASI PARTAI POLITIK DALAM PROSES REKRUTMEN KADER PEREMPUAN PADA PARTAI POLITIK DI ACEH

Erly Hasim  
Magister Ilmu Komunikasi Fisip USU  
erlyhasim@gmail.com

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui bagaimana peran komunikasi partai politik dalam proses rekrutmen kader perempuan serta akses yang dimiliki oleh kader perempuan pada partai politik di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian menggunakan Teori komunikasi politik sebagai grand teorinya. Teknik pengumpulan data adalah observasi langsung, dan wawancara mendalam dengan 9 informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, pemahaman, dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses perekrutan kader perempuan pada partai politik di Aceh, komunikasi yang dilakukan oleh partai politik memiliki beberapa bentuk diantaranya komunikasi interpersonal atau komunikasi yang bersifat langsung dan komunikasi organisasi atau komunikasi yang lebih terstruktur dan formal. Akses terpenting yang dapat dimiliki oleh kader perempuan jika bergabung dengan partai adalah kesempatan untuk dapat bertarung dalam pemilihan kursi legeslatif yang diadakan setiap lima tahun sekali. Kontrol perempuan terhadap partai-partai yang ada di Aceh tak ada bedanya dengan kontrol yang dimiliki oleh laki-laki dalam partai. Kader perempuan adalah sosok yang paling penting dalam menarik suara dari kaum perempuan yang dianggap sebagai suara pasti. Banyak partai politik yang memanfaatkan kader perempuan untuk menjaring suara dari kaum ibu-ibu karena perempuan dianggap memiliki pendekatan yang lebih baik kepada masyarakat. Sistem didalam partai yang banyak mengambil keputusan melalui sebuah rapat dapat meminimalisir kontrol yang dimiliki oleh perseorangan.

*Kata kunci* : komunikasi politik, rekrutmen, akses, partai politik

*Abstract:* This study aims to determine how the role of political party communication in the process of recruitment of female cadres and access that is owned by female cadres to political parties in Aceh. The research method used is qualitative descriptive method. The research uses political communication theory as its grand theory. Data collection techniques are direct observation, and in-depth interviews with 9 informants. Data analysis techniques used are data reduction, understanding, and interpretation. The results showed that in the process of recruiting female cadres to political parties in Aceh, communications conducted by political parties have some form of interpersonal communication or communication that besifat directly and communication organization or communication more structured and formal. The most important access that a female cadre can have when joining a party is the chance to be able to fight in the legislative seat election held every five years. The control of women against the parties in Aceh is no different from the controls held by men in the party. The female cadre is the most important figure in attracting the votes of women who are regarded as a definite voice. Many political parties use female cadres to pick up votes from women because women are considered to have a better approach to society. In-party systems that make many decisions through a meeting can minimize the control of an individual.

*Keywords:* political communication, recruitment, access, political parties

## PENDAHULUAN

Setiap menjelang pesta demokrasi, perempuan di Indonesia selalu mendapat kejutan-kejutan yang sangat berarti. Dimulai sejak Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 tentang kuota perempuan sekurang-kurangnya 30% baik yang duduk sebagai pengurus partai politik, sebagai calon anggota KPU maupun sebagai calon anggota DPR/DPRD. Kemudian menjelang Pemilu 2014, kaum perempuan kembali mendapat kesempatan lagi bahwa parpol peserta pemilu harus memenuhi syarat untuk menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat (UU No.8/2012, pasal 15 huruf d) dan pencalonan anggota DPR/D (UU No 8/2012 pasal 55).

Selanjutnya pengajuan calon legislatif (caleg) perempuan disusun dengan model zipper (UU No. 8/2012, pasal 56 ayat 2), misalnya nomor urut 1 caleg laki-laki, nomor urut 2 caleg perempuan, nomor urut 3 caleg laki-laki; atau nomor urut 1 caleg perempuan, nomor urut 2 dan 3 caleg laki-laki; atau nomor urut 1 dan 2 caleg laki-laki, nomor urut 3 caleg perempuan, dan seterusnya untuk nomor urut 4, 5, 6, nomor urut 7,8, 9, nomor urut 10, 11, 12 minimal harus ada 1 orang caleg perempuan.

Tentang masalah kesiapan perempuan calon legislatif tidak bisa lepas dari partai masing-masing, yaitu banyak partai yang tidak mampu mengisi kuota perempuan. Hal ini bukan karena disebabkan tidak adanya calon, melainkan tidak adanya kaderisasi pengurus perempuan, dan budaya politik patriarki di Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilawan. Regulasi tentang keterwakilan perempuan didalam partai politik sudah bagus, tetapi tanpa dukungan budaya dan persepsi masyarakat, regulasi ini tidak terlalu banyak mendorong jumlah keterwakilan perempuan. Siasat partai bahkan untuk mengisi kuota ini sangat mengecewakan, yaitu dengan mengambil

caleg perempuan yang sudah populer seperti artis atau perempuan pengusaha. Suatu tindakan pragmatis yang justru mengabaikan keseriusan proses politik, atau perempuan yang tidak populer hanya dijadikan sebagai pemanis, tidak sungguh-sungguh menempatkan mereka di wilayah strategis. Ini terlihat dari penempatan perempuan di nomor urut paling belakang atau di daerah pemilihan yang “gersang” yang wilayah tersebut justru menolak kehadiran caleg perempuan. Selain itu, KPU malah membolehkan tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan alasan bila tidak terpenuhi ketentuan 30% persen perempuan. Bahkan, partai politik melepas tangan caleg-caleg perempuan, dengan segala keterbatasannya harus bertarung dan berebut suara dengan caleg laki-laki dalam sistem pemilu proporsional terbuka. Hasil yang dapat kita lihat proses tersebut, hanya sedikit caleg perempuan yang duduk di parlemen, dan walaupun ada, mereka jarang berpartisipasi aktif dalam tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Sejak tahun 2004 perjuangan kaum perempuan dalam dunia politik semakin giat dilakukan demi mencapai kesetaraan berpolitik dengan para laki-laki, sampai sekarangpun perjuangan kaum perempuan di legislatif masih terus dilakukan, para aktivis perempuan dan para feminis yang menginginkan semua pihak bersedia mendukung affirmative action dengan harapan agar ada perimbangan antara laki-laki dengan perempuan di lembaga legislatif maupun lembaga-lembaga pengambilan keputusan, sehingga kebijakan-kebijakan publik/politik tidak akan bias *gender* tetapi justru akan mendinginkan suhu politik yang semakin hari kian memanas.

Adanya pemberian kuota 30% pada kursi legeslatif, maka kaum perempuan harus mulai berjuang melalui sarana-sarana yang ada. Partai politik merupakan salah satu sarana atau wadah yang sah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, disini kaum perempuan harus

mampu menunjukkan kemauan dan kemampuannya beraktivitas dalam partai, sehingga performance-nya di situ dapat dipakai sebagai standar penilaian prestasi dan sekaligus sebagai upaya menepis tuduhan bahwa pemberian kuota hanyalah sekedar belas kasihan kepada kaum perempuan.

Isu pemberdayaan perempuan menjadi garis besar landasan pikir tentang keterwakilan perempuan dalam politik, juga agar kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang disusun memiliki sudut pandang *gender*, dan tentunya ini menjadi sebuah harapan yang menjanjikan bagi suatu perjuangan yang cukup panjang. Fungsi komunikasi harus dimanfaatkan secara maksimal dalam proses perekrutan kader partai politik untuk merekrut orang-orang yang dianggap layak dan kapabel untuk duduk di lembaga parlemen atau legislatif. Masalah bagaimana sebuah partai merekrut orang-orang yang akan dijadikan calon legislatif tentunya sedikit banyak mempengaruhi pilihan konstituen, sebab pastinya konstituen memilih orang-orang yang dianggapnya layak dan pantas untuk menduduki jabatan publik tersebut.

Seperti banyak yang kita lihat bahwa salah satu arus utama rekrutmen adalah kaderisasi dan seleksi pemimpin dalam sistem kenegaraan yang demokratis melalui partai politik. Pola rekrutmen pemimpin memang terdapat beberapa perbedaan yang mendasar, seiring dengan berubahnya sistem politik yang dikembangkan. Saat ini beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh partai politik adalah bagaimana mulai menata diri agar proses seleksi kader / pemimpin mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas, terutama dalam melahirkan kader-kader perempuan dalam partai politik, dalam proses pengkaderan, ada dua persoalan yang penting. Pertama, bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk peningkatan kemampuan baik keterampilan maupun pengetahuan. Kedua, adalah kemampuan untuk menyediakan stok kader atau SDM

organisasi, dan terutama dikhususkan pada kaum muda. Ini merupakan bentuk pendidikan politik, dimana selama ini peran tersebut terabaikan. Namun yang banyak terjadi sekarang ini adalah proses seleksi yang serampangan tanpa kaidah-kaidah tertentu yang dilakukan oleh partai politik, dapat dilihat bahwa parpol tidak menseleksi secara ketat siapa-siapa yang akan dijadikan wakil rakyat nantinya.

Di Aceh sendiri sebagai provinsi yang menganut syariat Islam, keterwakilan perempuan di partai politik masih sangat minim, untuk wilayah aceh sendiri, dan dari keseluruhan jumlah kursi DPRD provinsi yang ada di Aceh hanya ditempati oleh 12 orang anggota DPRD perempuan (puskapol.ui.ac.id, 20140). Hal seperti inilah yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian ini, apakah terjadi kesalahan dalam proses perekrutan anggota kadaer partai politik atau apakah keterwakilan perempuan dalam partai politik di Aceh masih dianggap kurang perlu. Untuk itu, peneliti merasa tertarik untuk meneliti Peran Komunikasi Partai Politik Dalam Proses Rekrutmen dan Kontrol Kader Perempuan Pada Partai Politik di Aceh.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Komunikasi Politik

Konsep komunikasi politik adalah suatu proses komunikasi bertujuan untuk mendapatkan dukungan publik bagi seorang kandidat atau kebijaksanaan politik. Begitu juga konsep komunikasi politik yang ditawarkan Dan Nimmo dalam bukunya ("Political Communication and Public Opinion in America", 1978), ia melihat politik, seperti komunikasi yaitu sebagai suatu proses, dan seperti komunikasi yaitu sebagai politik yang melibatkan pembicaraan (Tjun Surjaman. 1989: 24). Lebih jauh Nimmo menekankan bahwa komunikasi politik bukan saja pembicaraan dalam arti sempit seperti

kata-kata yang diucapkan, melainkan pembicaraan dalam arti yang inklusif, yang meliputi segala cara orang bertukar simbol, kata-kata yang ditulis dan diucapkan, gambar, gerakan, sikap tubuh, perangai, dan pakaian. Dari uraian Nimmo, makna konsep yang dapat kita tangkap, bahwa komunikasi politik berusaha menempatkan ( setting ) maknanya sebagai proses komunikasi yang terjadi pada setiap interaksi politik. Dan tentunya pula, Nimmo berusaha menggambarkan secara inklusif bahwa adanya makna interaksi yang bermuatan politik pada akhirnya berawal dan berakhir dengan adanya proses komunikasi.

Sementara itu, dalam mengembangkan dan menggunakan konsep komunikasi dalam ruang lingkup pengaruh dan kekuasaan untuk menganalisis kerangka rujukan yang sama, maka yang perlu dipertimbangkan secara proporsional adalah kita berusaha membedakan subjeknya apakah itu subjek empirik ataukah normative. Dua subjek tersebut sukar dibedakan dalam pengkajian selanjutnya, apakah itu untuk penelitian ataukah untuk pengembangan teori. Jadi, sukarnya membedakan dua subjek tersebut menyebabkan setiap proses komunikasi politik (event-event) hanya dilihatnya sebagai realitas politik (dimensi empirik). Padahal, sebagai suatu kajian ilmiah harus didudukkan pada subjek normative, sehingga serangkaian peristiwa-peristiwa politik dimensinya tentu juga melibatkan proses komunikasi yang saling terkait atau kontekstual.

### **Konsep Gender**

Gender diartikan sebagai konstruksi sosio-kultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminin. Ketika kita bertemu dengan orang baru, kita pasti berusaha mengidentifikasinya sebagai pria atau wanita. Alasannya karena gender adalah salah satu kategori paling dasar dalam kehidupan sosial. Proses mengkategorikan orang atau sesuatu

menjadi maskulin atau feminin dinamakan gender typing (atau "sex typing")(penjenisan gender). Proses ini biasanya terjadi secara otomatis, tanpa banyak pemikiran mendalam (Glick & Fiske dalam Taylor, Shelley E 2009). Gender berbeda dengan seks atau jenis kelamin laki-laki dan wanita yang bersifat biologis. Walaupun jenis kelamin laki-laki sering berkaitan erat dengan gender maskulin dan jenis kelamin wanita berhubungan dengan gender feminin. Kaitan antara jenis kelamin dengan gender bukanlah merupakan korelasi absolut. Secara teoretik, terdapat tiga definisi mengenai gender yang kami cantumkan di sini, sebagai rujukan. Pertama, gender adalah pembedaan peran, identitas, serta hubungan antara perempuan dan lelaki yang merupakan hasil bentukan masyarakat. Kedua, gender adalah seperangkat harapan, keyakinan, dan stereotip yang seharusnya dilakukan oleh seorang individu, laki-laki atau perempuan dalam kehidupan sosial mereka. Ketiga, gender adalah seperangkat peran, seperti halnya kostum dan topeng di teater yang menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin.

Ketidakseimbangan berdasarkan gender mengacu pada ketidakseimbangan akses ke sumber-sumber penting, yang meliputi kekuasaan barang-barang material, jasa yang diberikan orang lain, prestise, peranan yang menentukan, waktu yang leluasa, kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan serta kebebasan dari paksaan atau siksaan fisik. Perbedaan gender (gender differences) antara laki-laki dan perempuan berlangsung terus menerus dalam sejarah yang sangat panjang dan kompleks hingga sekarang. Ia dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksikan secara sosial hingga banyak yang dianggap sebagai ketentuan Tuhan (seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi), sehingga

perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai sebuah kodrat.

### Partai Politik

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi nilai dan cita-cita yang sama. Kelompok ini mempunyai bertujuan untuk meraih kekuatan politik dan merebut kedudukan politik. Ada beberapa defenisi partai politik yang diberikan para ilmuwan politik. Carl Friedrich memberikan batasan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idiil kepada para anggotanya.

Roger H. Soltau, mengatakan bahwa partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasi, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka (Budiharjo, 2008).

### Rekrutmen Politik

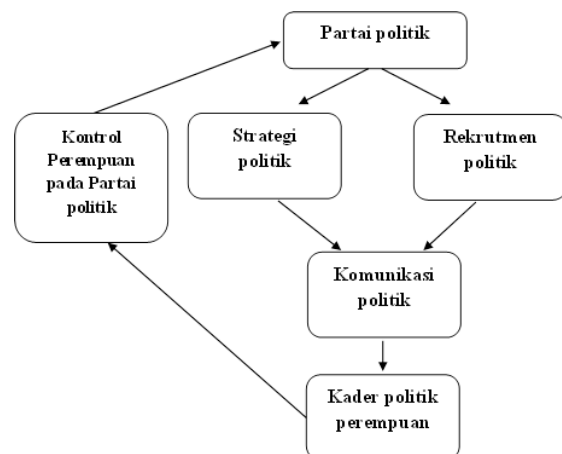
Rekrutmen merupakan suatu proses untuk mencari dan menyeleksi anggota untuk kegiatan regenerasi dari sebuah organisasi, baik partai politik, lembagapemerintahan maupun organisasi lainnya. Namun, rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa politik seperti yang terdapat

dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik karangan Miriam Budiharjo yang menyebutkan: "...proses mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai..."(Budiharjo,2008).

Istilah rekrutmen lebih dikenal dalam bahasa perpolitikan, dan kemudian diadopsi oleh partai politik seiring dengan kebutuhan partai akan dukungan kekuasaan dari rakyat, dengan cara mengajak dan turut serta dalam keanggotaan partai tersebut. Rekrutmen sendiri memiliki acuan waktu dalam prosesnya, maka pada saat itu pula rekrutmen dilakukan padasaat partai memerlukan.

### Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan mengenai teori-teori komunikasi politik dan proses rekrutmen partai yang ada di Indonesia, maka peneliti membuat kerangka pemikiran seperti dibawah ini.



## METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan aspek kajian penelitian sebagai berikut :

- a. Komunikasi politik yang digunakan sebagai dasar proses perekrutan kader partai politik.
- b. Langkah-langkah dalam proses perekrutan kader perempuan pada partai politik di Aceh.
- c. Proses komunikasi yang dilakukan oleh partai politik dalam perekrutan kader perempuan.
- d. Manfaat dan kontrol yang dimiliki oleh kader perempuan pada partai politik di Aceh.

Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pendekatan tunggal dalam analisis data. Pemilihan metode sangat tergantung pada *research question* (Baxter and Chua 1998); *Research Strategies And Theoretical Framework* (Glaser Strauss 1967). Untuk melakukan analisis, peneliti perlu menangkap, mencatat, menginterpretasikan dan menyajikan informasi. Suatu hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak dapat dipisahkan dari pengumpulan data. Oleh karena itu, ketika data mulai terkumpul dari wawancara dan observasi, analisis data harus segera dilakukan untuk menentukan pengumpulan data berikutnya.

Penelitian ini akan dilakukan di Aceh, tepatnya pada DPRD tingkat provinsi. Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian kali ini adalah para kader partai politik yang lolos dalam seleksi partai sampai sejauh ini. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah kader dari 15 partai politik, 12 informan berasal dari partai politik nasional, dan 3 informan berasal dari partai politik lokal. Pemilihan para kader partai politik sebagai informan karena dianggap mampu memberikan masukan yang sangat penting bagi peneliti dalam memahami proses rekrutmen yang terjadi di dalam partai tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Komunikasi Partai Politik Dalam Proses Perekrutan Kader Perempuan Pada Partai Politik Di Aceh

Dalam proses perekrutan kader perempuan pada partai politik di Aceh, komunikasi yang dilakukan oleh partai politik memiliki beberapa bentuk diantaranya komunikasi interpersonal atau komunikasi yang bersifat langsung dan komunikasi organisasi atau komunikasi yang lebih terstruktur dan formal. Komunikasi interpersonal dalam proses perekrutan kader perempuan pada partai politik di Aceh lebih banyak dilakukan karena proses pendekatan untuk merekrut kader perempuan biasanya akan lebih sulit daripada merekrut kader laki-laki. Pendekatan yang intens dan berbicara secara langsung kepada calon kader perempuan adalah cara yang paling tepat dalam mempersuasi kaum perempuan untuk dapat bergabung menjadi kader partai. Komunikasi organisasi dalam merekrut kader perempuan pada partai politik di Aceh dilakukan dengan cara membuka pendaftaran secara terbuka kepada siapa saja kaum perempuan yang ingin bergabung dengan partai dan harus menjalani seleksi yang biasa diikuti oleh seluruh calon kader partai. Pemanfaatan sistem rekrutmen yang berlaku secara umum didalam partai memungkinkan proses komunikasi organisasi yang terjadi didalam tubuh organisasi partai berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dalam berkomunikasi organisasi.

Proses komunikasi yang terjadi didalam partai politik dalam proses perekrutan kader perempuan pada partai politik di Aceh adalah sebuah cara untuk mendapatkan calon kader kompeten yang memiliki kualitas yang sesuai dengan keinginan partai. Memaksimalkan peran komunikasi dalam proses perekrutan kader perempuan akan membuat proses perekrutan itu sendiri menjadi lebih mudah dan cepat, serta calon kader yang didapat

akan sesuai dengan keinginan dan visi misi partai itu sendiri.

### **Akses dan partisipasi perempuan pada partai politik di Aceh**

Akses terpenting yang dapat dimiliki oleh kader perempuan jika bergabung dengan partai adalah kesempatan untuk dapat bertarung dalam pemilihan kursi legislatif yang diadakan setiap lima tahun sekali. Bergabungnya perempuan dalam partai akan membuka kesempatan dirinya untuk dapat dicalonkan oleh partai dalam pemilihan legislatif, kesempatan ini semakin terbuka lebar dengan adanya kebijakan afirmatif yang mengharuskan 30% perempuan harus terdaftar sebagai calon anggota legislatif dari sebuah partai. Partai-partai yang memiliki sedikit kader perempuan secara otomatis akan menunjuk kader perempuan yang mereka miliki untuk melaju dalam pemilihan kursi legislatif, kesempatan inilah yang biasa digunakan oleh kader perempuan untuk memaksimalkan potensinya agar terpilih dan maju sebagai anggota legislatif dari partai. Selain itu akses lainnya yang dimiliki oleh kader perempuan dalam partai adalah kesempatan dirinya untuk dapat menyuarakan aspirasinya secara langsung dan lebih tepat sasaran. Partai dianggap sebagai wadah yang paling tepat bagi kaum perempuan untuk menyuarakan aspirasinya. Partai dianggap sebagai wadah bagi terciptanya politisi-politisi perempuan yang handal. Semakin banyaknya politisi perempuan yang muncul maka semakin banyak pula aspirasi yang akan tertampung dan disuarakan.

Partisipasi perempuan pada partai politik di Aceh sudah sangat besar, hal ini terlihat dari banyaknya politisi perempuan yang telah menduduki kursi legislatif baik itu di DPR Kabupaten, DPR Aceh, maupun DPR RI. Partisipasi perempuan pada partai politik di Aceh tidak hanya dalam bentuk kursi di DPR saja, partisipasi perempuan dalam partai juga tercermin dari banyaknya kegiatan-kegiatan partai

yang yang dimotori dan diprakarsai oleh perempuan. Mengikuti sertakan perempuan dalam setiap kegiatan atau acara partai adalah hal wajib karena perempuan dianggap lebih pandai dalam manage sebuah acara atau event. Manfaat dan kontrol kader perempuan terhadap partisipasi perempuan pada partai politik di Aceh adalah :

a. Manfaat perempuan dalam partisipasinya pada dunia perpolitikan di Aceh sangat banyak, kader perempuan yang bergabung dengan partai bisa memperoleh pendidikan politik yang baik langsung dari orang-orang yang sudah berpengalaman dalam bidangnya. Selain itu manfaat yang dimiliki oleh kader perempuan dalam partisipasinya didalam partai adalah terbukanya kesempatan untuk menyuarakan aspirasinya dengan lebih baik dan lebih luas lagi. Kehadiran perempuan didalam partai selain sebagai salah satu syarat untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai kebijakan afirmatif yang ada manfaat kehadiran perempuan didalam sebuah partai politik dirasa sangat vital dalam menjangkau dan mengumpulkan suara dalam pemilu. Kader perempuan adalah sosok yang paling penting dalam menarik suara dari kaum perempuan yang dianggap sebagai suara pasti. Banyak partai politik yang memanfaatkan kader perempuan untuk menjangkau suara dari kaum ibu-ibu karena perempuan dianggap memiliki pendekatan yang lebih baik kepada masyarakat. Memanfaatkan kader perempuan untuk menjangkau suara adalah salah satu strategi yang digunakan oleh partai-partai di Aceh untuk memenangkan pemilu.

b. Kontrol perempuan terhadap partai-partai yang ada di Aceh tak ada bedanya dengan kontrol yang dimiliki oleh laki-laki dalam partai. Sistem didalam partai yang banyak mengambil keputusan melalui sebuah rapat dapat meminimalisir kontrol yang dimiliki oleh perseorangan, sehingga kontrol individu dalam sebuah

organisasi partai dapat dikatakan cukup minimal dalam penelitian ini. Seorang kader perempuan yang mengikuti sebuah rapat partai akan memiliki kontrol yang sama dengan laki-laki yang juga ikut dalam rapat tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa kontrol yang dimiliki perempuan didalam partai adalah sama besar dengan kontrol yang dimiliki oleh laki-laki.

## SIMPULAN

Partai politik di Aceh perlu memiliki komitmen yang kuat dari para elit politik partai dalam merekrut kader perempuan untuk merekrut kader perempuan yang berkualitas bagi partai, bukan hanya merekrut kader perempuan sekedar untuk memenuhi syarat Undang-Undang yang ada saja. Dengan adanya komitmen ini peneliti yakin kualitas kader perempuan yang akan direkrut nantinya akan lebih baik lagi karena partai akan merekrut kader perempuan untuk dijadikan sebagai politisi-politisi yang handal, bukan hanya sekedar pelengkap saja.

Dalam proses perekrutan kader perempuan pada partai politik di Aceh kedepannya harus lebih memperhatikan aspek latarbelakang dari kader perempuan yang direkrut, baik itu latar belakang pendidikan dan pengalamannya dalam berorganisasi dan berpolitik. Kebanyakan yang terjadi sebelumnya partai hanya merekrut kader perempuan yang memiliki popularitas tinggi dan dianggap mampu memenangkan pemilihan. Aspek latarbelakang pendidikan dan pengalamannya berpolitik hanya dinomorduakan saja. Kemampuan berpolitik dianggap mampu didapat setelah kader tersebut terpilih dan duduk di kursi legislatif.

## DAFTAR PUSTAKA

Andriana, Nina dkk. 2012. "Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan

di Tingkat Lokal". *Jurnal LIPI*. Hal 19-42.

Blake, Reed H dan Haroldsen. 2003. *Taksonomi Konsep Komunikasi Cetakan. Ke-1*. Surabaya: Papyrus.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Edisi Revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia. Pustaka Utama.

Cangara, Hefied. 2006. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dan Nimmo, 1978. "Political Communication and Public Opinion in America". Dalam *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*. (terj. Tjun Surjaman), (1989). Bandung: Remaja Rosda Karya.

DeVito, J. A. 2007. *The Intrapersonal Communication Book* edisi 11. Pearson Educations, inc.

Effendi, Onong Uchjana. 2006. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Effendy, Onong Uchjana, 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Glaser, Barney G & Strauss, Anselm L., (1967). *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*, Chicago, Aldine Publishing Company.

Hasrullah. 2001. *Megawati dalam Tangkapan Pers*. Yogyakarta: LKiS, hal. 25

James R. Scott, 2000. *Senjatanya Orang-orang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor.



- Juwito & Alawiyah S, Syafa. (2003). "Pola Komtjnikasi Politik Perempuan\ Dalam Pemilu". Jurnal Ilmu Komunikasi. Volume 1. No 2. Hal 121-128.
- Kasali, Rhenald. 2008. Manajemen Public Relations: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. 2012. "Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Cetakan ke 2".Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia.
- Koiruddin. 2004. Parpol dan Agenda Transisi Demokrasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kriyantono, Rachmat. 2009. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Morissan & Wardhany, Andy Corry. 2009. Teori Komunikasi. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mukarom, Zaenal. 2009. "Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif". Mediator. Volume 9. Hal 258-267.
- Mulyana, Deddy. 2001. Metodologi Penelitian Komunikasi. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution, Zulkarimein. 1990. Prinsip-Prinsip Komunikasi untuk Penyuluhan. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nawawi, H Hadari & Martini, Mimi. 1994. Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nazaruddin Umar. 1999. Perspektif Gender dalam al-Qur'an. Disertasi Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Pamungkas, Sigit, 2011. Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia, Yogyakarta : Institute For Democracy and Welfarisme.
- R Maran, Rafael .2000. Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budayadasar. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Rafael R. Maran. 2001. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Ritzer, George-Goodman, Douglas J. 2004. Teori Sosiologi Modern, Prenada Media, Jakarta.
- Ruben, Brent D, Stewart, Lea P. 2005. Communication and Human Behaviour, USA: Alyn and Bacon.
- Rush, Michael dan Phillip Althoff. 2007. Pengantar Sosiologi Politik, Alih Bahasa oleh Kartini Kartono. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- S. Katz, Richard dan William Crotty. 2006. Handbook of Party Politice. London: Sagen Publications
- Sanjaya, Wina. 2013. Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Septian, Doni. 2014. "Rekrutmen Politik Dalam Penetapan Calon Legislatif 2014-2019". Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang. Hal 13-19.
- Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Widya Pustaka.
- Taylor, Shelley E, ET AL. 2009. Psikologi Sosial, Edisi Kedua Belas. Jakarta: Kencana.

Undang-undang republik indonesia Nomor 10 tahun 2008.

Vardiansyah, Dani. 2008. *Filsafat Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Indeks.

Wahid, Umaimah. 2012. "Aliansi Jaringan dalam Proses Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan". *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Volume 10. No 1. Hal 69-84.

Walby, Sylvia. 1990. *Theorizing Patriarchy*, Oxford : Blackwell Publishers Inc.

West, Richard dan Lynn H. Turner. 2009. *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Salemba Humanika, Jakarta.

Zamroni, Mohammad. 2013. "Perempuan Dalam Kajian Komunikasi Politik Dan Gender". *Jurnal Dakwah*. Volume XIV. No 1. Hal 103-132.